

KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU GUNA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

COOPERATION IN THE ELECTION OF LOGISTIC DISTRIBUTION OF THE OPERATION OF REGIONAL HEAD ELECTION

Bonaparte Priyatna

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002²⁸ tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emptif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.

Kata kunci: Pendistribusian, logistik, Pemilu

ABSTRACT

Community security and order is a dynamic situation and condition of society as a prerequisite for the implementation of a development process in the context of achieving national goals, which are characterized by security, order and the upholding of law and the realization of peace and ability to develop and develop community potential and strength in preventing, preventing and overcoming all forms of violation of law are also other forms of disturbance that are disturbing the community. Maintenance of public security and order (Harkamtibmas) is one of the main tasks of the National Police as mandated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which was actualized through several fields of tasks such as pre-emptive, preventive and repressive activities (law enforcement) which were carried out continuously by the National Police.

Keywords: *Distribution, logistics, elections*

²⁸ Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004²⁹ tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan perihal menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung menimbulkan beberapa kerawanan, yang kalau tidak secara dini diantisipasi oleh Polri khususnya Polres Bandung dan jajarannya yang bertanggung jawab atas keamanan penyelenggaraan Pemilukada akan berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada secara aman, tertib, lancar dan demokratis. Polri selaku penanggung jawab utama dalam hal tugas pengamanan, diharapkan mampu mensukseskan jalannya pelaksanaan pemilukada baik Pemilukada Gubernur, Bupati maupun Walikota secara damai pada seluruh tahapan Pemilukada.

Beberapa kerawanan, yang berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pelaksanaan Pemilukada tentu perlu diantisipasi untuk terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif bagi terselenggaranya Pemilukada. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi sudah semestinya diperhitungkan sejak awal sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaannya. Oleh karena itu Polres Bandung sebagai penanggung jawab keamanan perlu jauh-jauh hari mengantisipasi semua kekhawatiran yang menimbulkan kerawanan selama

Pemilukada dengan melakukan kerjasama dengan KPU kabupaten dalam hal pengamanan pemilu. KPU Kabupaten sebagai penyelenggara pemilu memerlukan kepastian keamanan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan umum.

Dengan adanya kerjasama dengan KPU Kabupaten diharapkan Polres Bandung mampu mengeliminasi Potensi gangguan yang pada batas tertentu menjadi sumber ancaman terjadinya gangguan nyata khususnya pada pendistribusian logistik pemilu.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat adalah *“Belum optimalnya kerjasama Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pendistribusian logistik pemilu guna mensukseskan pemilihan umum kepala daerah dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat “*

Pokok-pokok persoalan

Bagaimana kerjasama Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pendistribusian logistik pemilu ?

Bagaimana sistem dan metode pengamanan yang digunakan dalam pendistribusian Logistik Pemilu ?

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada terkait

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

optimalisasi pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan pemilukada yang diselenggarakan di wilayah Polres Bandung

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam naskah ini adalah dengan pendekatan tugas, pendekatan yuridis, pendekatan empiris, serta pendekatan studi kepustakaan.

Pendistribusian logistik Pemilu Merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah³⁰

Mensukseskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mensukseskan berasal dari kata dasar sukses yang memiliki arti menjadikan berhasil; menjadikan beruntung³¹

Pemilihan Kepala Daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³²

Terwujudnya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terwujud berasal dari kata wujud yang berarti terlaksana; terbukti³³

Keamanan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keamanan berasal dari kata aman yang berarti keadaan aman; ketenteraman³⁴

Ketertiban Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia ketertiban berasal dari kata

tertib yang berarti keadaan serba teratur baik³⁵.

Teori dan konsep yang digunakan oleh penulis optimalisasi pengamanan tahapan pemungutan suara guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya kamtibmas adalah sebagai berikut:

Teori Kerjasama Menurut Roucek dan Warren dalam Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing.³⁶

Teori Manajemen Strategis Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam Rahmat, Manajemen Strategik (2014: 15-30) "*Strategic Management is that set of managerial decision and actions that determines the long-run performance of a corporation*" konsep tersebut dapat diterjemahkan secara bebas bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis pada dasarnya terdapat 4 elemen yaitu ; 1) Pemindaian lingkungan (*enviromental scanning*) yang

³⁰ Uu no 32 th 2004 tentang pemerintah daerah pasal 65 ayat 3

³¹ <http://kbbi.web.id/sukses> , diakses pada tanggal 29 januari 2014, pukul 14.30

³² Uu no 32 th 2004 tentang pemerintah daerah pasal 56 ayat 1

³³ <http://kbbi.web.id/wujud> , diakses tanggal 29 Januari 2014, pukul 14.30

³⁴ <http://kbbi.web.id/aman> , diakses tanggal 29 Januari 2014, pukul 14.30

³⁵ <http://kbbi.web.id/tertib> , diakses tanggal 23 januari 2014, pukul 10.30

³⁶ Roucek dan Warren dalam Abdul Syani, 2002, *Sosiologi: Skema, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 156

biasanya menggunakan analisis SWOT; 2) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), yang dilakukan dengan menentukan visi, misi, tujuan dan kebijakan serta strategi; 3) Implementasi Strategi (*Strategy Implmentation*), dan 4) Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Control*).³⁷

Teori manajemen George R. Terry dan Leslie W. Rue mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.³⁸ Dimana Terry menjabarkan fungsi-fungsi manajemen ke dalam kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
- b. *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
- e. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil

tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Pembahasan

Kerjasama Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pendistribusian Logistik Pemilu

Polri selaku penanggung jawab utama dalam hal tugas pengamanan, diharapkan mampu mensukseskan jalannya pelaksanaan pemilu. Suksesnya pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari kerjasama antara Polres Bandung dengan KPU kabupaten dalam hal pengamanan pemilu. Adapun kerjasama saat ini antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam hal pendistribusian Logistik pemilu sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi kegiatan internal KPU Kabupaten sehingga menyebabkan keterlambatan dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu. Masih ditemukannya pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten tanpa dikawal oleh personil Polres Bandung. hal ini sangat rawan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah.
- a. Tidak adanya sarana angkutan air yang dimiliki oleh KPU kabupaten dalam pendistribusian Logistik pemilu yang melewati sungai sehingga dalam pendistribusian logistik pemilu mengalami keterlambatan.
- b. Minimnya jumlah personil KPU Kabupaten sangat berpengaruh terhadap pendistribusian Logistik Pemilu.

³⁷ J.David Hunger dan Thomas L Wheelen dalam Rahmat, 2014, *Manajemen strategic* Bandung cv pustaka setia, hal 15-30.

³⁸ George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, hal 9-10.

Sistem dan metode pengamanan yang digunakan dalam pendistribusian Logistik Pemilu

a. Perencanaan

Polres Bandung dalam menyusun perencanaan pengamanan pendistribusian Logistik pemilu dari KPU kabupaten ke kecamatan dengan menggunakan Personil dari Polres Bandung. kemudian pendistribusian dari kecamatan menuju ke TPS-TPS pendistribusian di kawal oleh polsek setempat. Belum dibuatnya SOP terkait pendistribusian logistik Pemilu.

b. Pengorganisasian

Dalam pendistribusian Logistik Pemilu hanya dilaksanakan oleh beberapa Personil polres dan polsek, belum ditunjuknya Perwira Penanggung jawab dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu sehingga rawan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

c. Pelaksanaan

Dalam hal pengamanan pelaksanaan pemilu masih ditemukannya personil Polres Bandung yang melaksanakan tugas rangkap. Dimana setelah melaksanakan pendistribusian logistik pemilu, personil Polres yang melaksanakan pengawasan logistik Pemilu langsung melaksanakan pengamanan di TPS-TPS.

d. Pengendalian

Personil yang melaksanakan pengamanan pendistribusian Logistik pemilu tidak dilengkapi dengan HT, sehingga dalam pelaksanaan laporan

pelaksanaan tugas personil Polres menggunakan Hand Phone pribadi.

Implikasi

Berbagai kelemahan dalam kerjasama pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Umum kepala Daerah sebagaimana dikemukakan diatas, berimplikasi terhadap masih adanya keterlambatan pendistribusian Logistik pemilu.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kerjasama pendistribusian logistik pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya kamtibmas. secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Faktor internal

Kekuatan

- a. Legitimasi kepolisian untuk melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan represif.
- b. Renstra Polri tahap *Partnership building*, menjadi pendorong Polres Bandung untuk diimplementasikan.
- c. Adanya komitmen antara pimpinan Polri dengan Ketua KPU terkait pengamana seluruh tahapan pemilu.
- d. Adanya motivasi yang tinggi dari personil Polres Bandung dalam melaksanakan tugas.

e. Kelemahan

- 1) Kurangnya jumlah personil Polres Bandung dalam melaksnakan pengamanan seluruh tahapan Pemilukada.
- 2) Kurangnya kemampuan Personil Polres Bandung dalam pendistribusian Logistik pemilu.

- 5) Belum terjalin hubungan yang baik/koordinasi dengan KPU Kabupaten.
- 6) Pengendalian kerjasama belum ada.
- 7) Pemahaman anggota terhadap pentingnya kerjasama masih rendah.
- 8) Alat komunikasi HT yang terbatas sehingga akan berpengaruh pada saat pelaksanaan pendistribusian Logistik pemilu.

Faktor eksternal

Peluang

- 1) Masih adanya kepercayaan dan dukungan pemerintah daerah serta masyarakat terhadap Polres Bandung
- 2) LSM untuk turut melakukan pengawasan/kontrol sosial terhadap kinerja Polri.
- 3) kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk memberikan laporan pada satuan atas.
- 4) Adanya kekuatan TNI yang dapat dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

c. Ancaman

- 1) Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Luas wilayah hukum Polres Bandung yang sangat luas berdampak pada ketepatan waktu dalam pendistribusian Logistik pemilu.
- 3) Kurangnya kepekaan KPU Kabupaten terhadap kerjasama yang telah dibuat terkait pengamanan pelaksanaan pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 4) Padatnya jadwal pentahapan dalam pemilukada.

KONDISI IDEAL

Kerjasama Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pendistribusian Logistik Pemilu

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Harapan bentuk kerjasama yang dibangun antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pendistribusian Logistik Pemilu sebagai berikut;

Adanya informasi terkait kegiatan internal KPU Kabupaten sehingga tidak terjadi pendistribusian Logistik Pemilu.

Seluruh pendistribusian Logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten di kawal oleh personil Polres Bandung sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu.

Adanya sarana angkutan air yang dimiliki oleh KPU Kabupaten guna mendistribusikan Logistik Pemilu yang dilaksanakan melewati sungai.

Adanya penambahan jumlah personil KPU Kabupaten sehingga dapat membantuk pelaksanaan tugas KPU kabupaten.

Sistem dan metode pengamanan yang digunakan dalam pendistribusian Logistik Pemilu

a. Perencanaan

Dalam hal pendistribusian logistik Pemilu agar dibuatkannya SOP terkait pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu. Sehingga personil Polres dalam melaksanakan tugas memiliki pedoman dalam bertindak di lapangan.

b. Pengorganisasian

Dalam setiap kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu khususnya pendistribusian Logistik pemilu agar ditunjuk Perwira penanggung jawab pelaksanaan tugas sehingga dapat meningkatkan moril anggota dalam melaksanakan kegiatan.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan personil polres diharapkan tidak melaksanakan rangkap tugas. Sehingga personil Polres Bandung dalam melaksanakan tugas memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi.

b. Pengendalian

Personil yang melaksanakan pengamanan pendistribusian Logistik pemilu diharapkan dilengkapi dengan HT, sehingga dapat memudahkan untuk melaksanakan koordinasi dan laporan terhadap kesatuan atas.

Kontribusi

Melalui berbagai pembenahan menyangkut kerjasama antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten serta system dan metode dalam pendistribusian logistic pemilu diharapkan dapat mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga kamtibmas dapat terwujud.

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan analisa faktor internal dan eksternal yang ada, maka penulis merumuskan suatu program optimalisasi kerjasama pendistribusian logistik pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya kamtibmas sebagai berikut :

Visi

“ Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Daerah. “

Misi

- a. Mengembangkan kerjasama pendistribusian Logistik pemilu guna mensukseskan Pemilihan umum Kepala Daerah.
- b. Meningkatkan sitem dan metode pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah.

Tujuan

- a. Terciptanya kerjasama pendistribusian Logistik pemilu guna mensukseskan Pemilihan umum Kepala Daerah.
- b. Terwujudnya sitem dan metode pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah.

Sasaran

- a. Meningkatnya kerjasama pendistribusian Logistik pemilu guna mensukseskan Pemilihan umum Kepala Daerah.
- d. Terlaksananya sitem dan metode pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah.

Kebijakan

Sebagai suatu keputusan strategi dalam optimalisasi pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya kamtibmas.

Strategi

Untuk mendapatkan susunan strategi Berkaitan dengan optimalisasi kerjasama pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah

dalam rangka terwujudnya kamtibmas maka diperlukan sebuah analisis SWOT.

Kerjasama pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya kamtibmas, beberapa strategi yang dilakukan adalah :

- a. Jangka pendek (0-6 bulan)
 1. Mengoptimalkan kerjasama dengan KPU kabupaten
 2. Adakan sosialisasi terkait kerjasama dengan KPU Kabupaten.
- a) Jangka sedang (0-12 bulan)
 1. Anev
 2. Adakan Koordinasi dengan pihak TNI
- b. Jangka panjang (0-2 tahun)
 1. Anev
 2. Penyusunan SOP terkait pendistribusian Logistik Pemilu

Action plan

Strategi jangka pendek (0- 6 bulan)

- a. Mengoptimalkan kerjasama dengan KPU Kabupaten.
- b. Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ops untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak KPU kabupaten terkait kegiatan Internal KPU Kabupaten.
- c. Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ops agar menunjuk salah satu perwira polres sebagai Perwira Penghubung yang ditugaskan di kantor KPU kabupaten.
- d. Kapolres memerintahkan Kepada Kabagops agar membuat rencana pengamanan terkait seluruh kegiatan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pilukada.
- e. Adakan sosialisasi terkait kerjasama dengan KPU Kabupaten.
- f. Kapolres memerintahkan kepada Kabag ops untuk merencanakan

kegiatan sosialisasi kepada seluruh Personil Polres Bandung dan seluruh Personil KPU Kabupaten terkait kerjasama dengan KPU Kabupaten.

- c) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ops agar bersama-sama dengan pihak KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Personil Polres Bandung dan personil KPU Kabupaten terkait kerjasama yang telah dibuat antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten.

Strategi jangka menengah (0-12 bulan)

- a. Adakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi jangka pendek, melalui strategi yang sudah berjalan dan memperbaiki implementasi strategi yang belum maksimal.
- b. Adakan koordinasi dengan pihak TNI
- c. Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ops agar melaksanakan koordinasi dengan pihak TNI terkait pelibatan kekuatan TNI dalam pelaksanaan pengamanan pilukada.
- d. Kapolres memerintahkan kabag Ops agar membuat rencana pengamanan yang melibatkan kekuatan TNI dalam pelaksanaan pengamanan pemilu.

Strategi jangka panjang (0-2 tahun)

- a. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap strategi jangka sedang, melanjutkan strategi yang sudah berjalan dan memperbaiki strategi yang belum maksimal.
- b. Penyusunan SOP terkait pendistribusian Logistik Pemilu
 - a) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ops untuk menyusun SOP dalam pelaksanaan pendistribusian Logistik pemilu.

- b) Kapolres memerintahkan Kepada Kabag Ops agar SOP yang telah disusun disosialisasikan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan pemilukada.
- c) Kapolres memerintahkan Kepada Kabag Ops agar melatih SOP yang telah disusun kepada seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan.

Kesimpulan

Kerjasama antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten dalam pengamanan pelaksanaan pemilukada khususnya dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu dirasakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya keterlambatan pendistribusian Logistik pemilu sehingga perlu dioptimalkannya kerjasama antara Polres Bandung dengan KPU Kabupaten khususnya dalam hal pendistribusian Logistik pemilu dengan harapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

System dan metode dalam pendistribusian logistik pemilu baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dirasakan belum optimal sehingga diperlukan pembenahan pada setiap tahapan.

Rekomendasi

Mengusulkan kepada Kapolda u.p Kabid kum untuk dapat disetujui dan disahkannya konsep SOP Pendistribusian Logistik Pemilu.

Demikian Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan

pengetahuan, referensi, waktu dan pengalaman pasis, namun demikian merupakan usaha yang maksimal. Harapan pasis semoga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan langkah-langkah dan kebijakan bagi pimpinan dan rekan-rekan dalam upaya mengoptimalkan kerjasama pendistribusian Logistik Pemilu guna mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hunger David dan Thomas L Wheelen dalam Rahmat,2014, *Manajemen strategic*, Bandung, cv pustaka setia.
- Rangkuti Freddy, 2000, *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- R.George Terry dan Leslie W. Rue, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta , Bumi Aksara.
- Warren dan Roucek dalam Abdul Syani, 2002, *Sosiologi: Skema, Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
-Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negar Republik Indonesia*.
- Uu no 32 th 2004 tentang pemerintah daerah
-Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2013 tentang norma, standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.